

ANALISIS KETERGANTUNGAN FISKAL PEMERINTAH DAERAH DI PROVINSI SULAWESI SELATAN PADA ERA OTONOMI DAERAH

Sanusi Fattah & Irman
(Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin)

ABSTRACT

This study aims to determine the level of fiscal dependence of the South Sulawesi Provincial Government by measure the performance / financial capacity of local governments using the degree of Fiscal Decentralization readiness and local governments in financial management, if fully funded by local government revenue and the local revenue sharing funds.

Data in the form of research reports Local Government Finance Statistics and the population of South Sulawesi province in 2001-2008. While the analysis method used was descriptive statistics.

The results showed that the performance / financial capability of South Sulawesi Provincial Government is still low when measured by the degree of Fiscal Decentralization Indicator, as well as readiness of local government in the face of regional autonomy, especially in finance, as measured by how far the ability of affairs when the financing is fully funded by local government revenue and revenue sharing funds is still low. This illustrates the level of Government Fiscal dependence in this area is still high.

Keywords: Autonomy, performance / capability of Finance, Regional Readiness, Fiscal dependency.

PENDAHULUAN

Otonomi Daerah merupakan isu strategis konsep pembangunan ekonomi berbasis Desentralisasi di Indonesia. Tujuan yang paling penting dan kebijakan otonomi daerah ini adalah untuk memberi wewenang yang lebih luas kepada pemerintah daerah terutama dalam mengatur pembangunan daerahnya sendiri. 1 Januari tahun 2001 merupakan awal diberlakukannya kebijakan Otonomi daerah, pemberian otonomi yang luas membuka jalan bagi pemerintah daerah untuk melakukan pembaharuan dalam sistem pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Untuk itu setiap daerah dituntut agar dapat membiayai daerahnya sendiri melalui sumber-sumber keuangan yang dimilikinya. Kemampuan daerah dalam menggali dan mengembangkan potensi daerah yang dimilikinya sebagai sumber pendapatan daerah akan sangat menentukan keberhasilan kebijakan otonomi daerah tersebut.

Keseriusan pemerintah Indonesia mengenai otonomi daerah diwujudkan dengan dihasilkannya UU No. 22 tahun 1999 yang telah diganti dengan UU No. 32 tahun 2004 mengenai pembagian kewenangan di pemerintah daerah, dan UU No. 25 tahun 1999 yang telah diganti dengan UU No. 33 mengenai Pembagian Keuangan antara Pusat dan Daerah. Undang-undang tersebut telah dijadikan sebagai aturan umum dalam implementasi kebijakan otonomi daerah di seluruh Indonesia. Kecuali Aceh dan Propinsi Papua yang memperoleh otonomi khusus.

Adanya dana perimbangan dalam otonomi daerah merupakan bentuk tanggung jawab dari pemerintah pusat atas berjalannya proses otonomi daerah. Hal ini juga sebagai wujud bahwa walaupun sistem yang diterapkan adalah sistem otonomi daerah, akan tetapi tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun di sisi yang lain, adanya dana perimbangan yang terlalu besar akan menimbulkan persepsi bahwa daerah tersebut tidak mandiri secara fiskal dan akan sampai pada kesimpulan akhir bahwa otonomi daerah tidak efektif untuk dilaksanakan.

Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa hampir di semua daerah prosentase Pendapatan Asli Daerah, relatif lebih kecil, sekitar 25% dari total penerimaan daerah. Pada umumnya APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) suatu daerah didominasi oleh sumbangan pemerintah pusat dan sumbangan-sumbangan lain, yang diatur dengan peraturan perundang-undangan, yaitu sekitar 75% dari total penerimaan daerah (Yani, 2002: 3). Hal ini menyebabkan daerah masih tergantung kepada pemerintah pusat, sehingga kemampuan daerah untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki menjadi sangat terbatas. Rendahnya PAD suatu daerah bukanlah disebabkan oleh karena secara struktural daerah memang miskin atau tidak memiliki sumber-sumber keuangan yang potensial, tetapi lebih banyak disebabkan oleh kebijakan pemerintah pusat. Selama ini sumber-sumber keuangan yang potensial dikuasai oleh pusat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dipandang sebagai salah satu indikator atau kriteria untuk mengukur tingkat ketergantungan suatu daerah kepada pemerintah pusat. Kemampuan keuangan suatu daerah dapat dilihat dari besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh daerah yang bersangkutan. Pada prinsipnya, semakin besar sumbangan PAD kepada APBD akan menunjukkan semakin kecilnya tingkat ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat.

KAJIAN PUSTAKA

Otonomi Daerah

Istilah otonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *outus* yang berarti sendiri dan *nomos* berarti undang-undang. Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 5. "Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan." (Undang-Undang Otonomi Daerah 2004: 4).

Otonomi daerah sebagai salah satu bentuk desentralisasi pemerintahan, pada hakekatnya bertujuan untuk memenuhi kepentingan bangsa secara keseluruhan. Berdasarkan ide hakiki yang terkandung dalam konsep otonomi, maka Sarundajang (2002) juga menegaskan tujuan pemberian otonomi kepada daerah meliputi 4 aspek sebagai berikut : (1) Dari segi politik adalah mengikutsertakan, menyalurkan aspirasi dan inspirasi masyarakat, baik untuk kepentingan daerah sendiri, maupun untuk mendukung politik dan kebijakan nasional; (2) Dari segi manajemen pemerintahan, adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan; (3) Dari segi kemasyarakatan, untuk meningkatkan partisipasi serta menumbuhkan kemandirian masyarakat melalui upaya pemberdayaan masyarakat untuk mandiri; (4) Dari segi ekonomi pembangunan, adalah untuk melancarkan pelaksanaan program pembangunan guna tercapainya kesejahteraan rakyat.

Ketergantungan Fiskal Daerah Terhadap Pusat

Permasalahan yang sering terjadi terkait dengan diberlakukannya otonomi daerah dan desentralisasi adalah bagaimana daerah dapat mengatasi ketergantungan terhadap pemerintah pusat dalam hak ketergantungan fiskal untuk kebutuhan segala kegiatan pembangunan daerah (Kuncoro, 2004). Keberhasilan otonomi daerah tidak terlepas dari kemampuan dalam bidang keuangan yang merupakan salah satu indikator penting dalam menghadapi otonomi daerah. Dalam hal ini pemerintah daerah dituntut untuk menjalankan roda pemerintahan secara efektif dan efisien untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan dengan meningkatkan pemerataan dan keadilan.

Untuk melihat ketergantungan fiskal pemerintah daerah dapat dilakukan dengan mengukur kinerja/kemampuan keuangan pemerintah daerah dan mengukur kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi otonomi daerah khususnya dibidang keuangan, dapat diukur dari seberapa jauh kemampuan pembiayaan bila didanai

sepenuhnya oleh Pendapatan Asli Daerah dan Bagi Hasil. Mengukur kinerja/kemampuan keuangan pemerintah daerah dapat dilakukan dengan menggunakan indikator Derajat Desentralisasi Fiskal (Musgrave & Musgrave, 1980). Sedangkan untuk Melihat kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi otonomi daerah khususnya dibidang keuangan, dapat diukur dari seberapa jauh kemampuan pembiayaan urusan bila didanai sepenuhnya oleh Pendapatan Asli Daerah dan Bagi Hasil (Sumarsono, 2009).

Menurut Halim (2001), ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan otonomi adalah (1) kemampuan keuangan daerah, yang berarti daerah tersebut memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan; (2) Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, oleh karena itu, PAD harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Kedua ciri tersebut akan mempengaruhi pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Secara konseptual, pola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah harus sesuai dengan kemampuan daerah dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan. Oleh karena itu, untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah, salah satunya dapat diukur melalui kinerja keuangan daerah.

Pola Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah

Jenis rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD adalah rasio kemandirian. Menurut Halim (2002:128) gambaran citra kemandirian daerah dalam berotonomi dapat diketahui melalui beberapa besar kemampuan sumber daya keuangan untuk daerah tersebut, agar mampu membangun daerahnya di samping mampu pula untuk bersaing secara sehat dengan kabupaten lainnya dalam mencapai otonomi yang sesungguhnya. Upaya nyata di dalam mengukur tingkat kemandirian yaitu dengan membandingkan besarnya realisasi PAD dengan total pendapatan daerah .

Secara konsepsional, pola hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, harus dilakukan dengan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, walaupun pengukuran kemampuan keuangan daerah ini akan menimbulkan perbedaan. Ada empat macam pola yang memperkenalkan "hubungan situasional" yang dapat digunakan dalam pelaksanaan otonomi daerah, terutama pelaksanaan undang-undang nomor 25 tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang No.33 tahun 2004 tentang "Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah" (Halim, 2002:168-169), Paul Hersey dan Kenneth Blanchard dalam Halim (2001) mengemukakan mengenai hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah antara lain:

- a. Pola hubungan *instruktif*, peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah.
- b. Pola hubungan *Konsultatif* campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi.
- c. Pola hubungan *partisipatif* peranan pemerintah pusat semakin berkurang mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah.
- d. Pola hubungan *delegatif* campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

Bertolak dari teori tersebut, karena adanya potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berbeda, akan terjadi pula perbedaan pola hubungan dan tingkat kemandirian suatu daerah.

Metode Analisa Data

Metode analisa yang digunakan adalah statistik deskriptif yaitu metode yang menggambarkan keadaan obyek penelitian berdasarkan data kuantitatif yang disajikan dalam bentuk tabulasi dan visualisasi berupa grafik, dengan ukuran-ukuran statistik sederhana seperti jumlah (total), rata-rata, pertumbuhan, persentase (%), proporsi, rasio yang dapat diterapkan sebagai alat analisis (Manurung, 2008).

Untuk melihat tingkat ketergantungan fiskal pemerintah daerah dapat dilakukan dengan cara:

1. Mengukur kinerja/kemampuan keuangan daerah dapat dilakukan dengan menggunakan indikator Derajat Desentralisasi Fiskal (Musgrave & Musgrave, 1980). Berdasarkan Sukanto Reksohadiprojo (2001) dalam bukunya "*Ekonomi Publik*" untuk mengukur Derajat Desentralisasi Fiskal dapat dilakukan dengan cara:

$$1) \text{ Proporsi PAD terhadap TPD} = \frac{\text{PAD}}{\text{TPD}}$$

$$2) \text{ Proporsi BHPBP terhadap TPD} = \frac{\text{BHPBP}}{\text{TPD}}$$

$$3) \text{ Proporsi SD terhadap TPD} = \frac{\text{SD}}{\text{TPD}}$$

Dimana:

PAD = Pendapatan Asli Daerah

BHPBP = Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak untuk daerah

SD = Sumbangan Daerah

TPD = Total Pendapatan Daerah

Untuk mengukur tingkat Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah, Skala interval Derajat Desentralisasi Fiskal dilakukan dengan menggunakan kategori sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pola Hubungan dan tingkat kemampuan daerah

Kemampuan/Ketergantungan Keuangan	Persentase	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0%-25%	<i>instruktif</i>
Rendah	25%-50%	<i>konsultatif</i>
Sedang	50%-75%	<i>partisipatif</i>
Tinggi	75%-100%	<i>delegatif</i>

Sumber ; Nadeak, 2003;21

Tabel 3.2
Skala interval Derajat Desentralisasi Fiskal

%	Kemampuan Keuangan Daerah
00,00-10,00	Sangat Kurang
10,01 -20,00	Kurang
20,01 -30,00	Cukup
30,01 -40,00	Sedang
40,01 - 50,00	Baik
> 50,00	Sangat baik

Sumber. Depdagri, 1991: 20

Melihat kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi otonomi daerah khususnya dibidang keuangan, diukur dari seberapa jauh kemampuan membiayai belanja daerah bila didanai sepenuhnya oleh Pendapatan Asli Daerah dan Bagi Hasil. Rasio yang digunakan adalah sebagai berikut (Sumarsono, 2009):

1. Perbandingan PAD dengan Total Belanja

2. Perbandingan PAD dengan Belanja Tidak Langsung
3. Perbandingan PAD + Bagi Hasil dengan Total Belanja
4. Perbandingan PAD + Bagi Hasil dengan Belanja Tidak Langsung
5. Perbandingan PAD per Kapita dengan Belanja Tidak Langsung per Kapita
6. Perbandingan PAD per Kapita dengan Total Belanja per Kapita
7. Perbandingan PAD + Bagi Hasil per Kapita dengan Total Belanja per Kapita
8. Perbandingan PAD + Bagi Hasil per Kapita dengan Belanja Tidak Langsung per Kapita

Untuk mengukur Skala interval Kemampuan dalam membiayai Belanja Daerah dilakukan dengan menggunakan kategori sebagai berikut:

Tabel 3.3
Skala Interval Kemampuan dalam membiayai Belanja Daerah

%	Kemampuan Keuangan Daerah
00,00 - 20,00	Sangat Kurang
20,01 -40,00	Kurang
40,10-60,00	Cukup
60,10-80,00	Baik
80,10-100	Sangat Baik

Sumber : Sri Wahyuni, 2008;42

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis dari kinerja/kemampuan keuangan pemerintah daerah di Sulawesi Selatan yang dilakukan dengan menggunakan indikator Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) pada era otonomi daerah dapat dijelaskan dengan uraian berikut ini:

Proporsi PAD terhadap TPD dengan rata-rata per tahunnya yang sebesar 6,78% jika dilihat dari rasio pola hubungan dan tingkat kemampuan/kemandirian suatu daerah maka akan tergolong dalam pola hubungan *instruktif*. Jadi dapat disimpulkan bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah masih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa pada era otonomi daerah, ketergantungan fiskal pemerintah daerah di Sulawesi Selatan pada pemerintah pusat masih tinggi. Dengan sumbangsuhnya pemerintah pusat pada APBD sebesar 93,22%.

Proporsi BHPBP terhadap TPD Proporsi BHPBP terhadap TPD dengan rata-rata per tahunnya yang sebesar 8,62% jika dilihat dari rasio pola hubungan dan tingkat kemampuan/kemandirian suatu daerah maka akan tergolong dalam pola hubungan *instruktif*. Jadi dapat disimpulkan bahwa tingkat kemandirian daerah masih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa pada era otonomi daerah, ketergantungan fiskal pemerintah daerah di Sulawesi Selatan pada pemerintah pusat masih tinggi. Dengan sumbangsuhnya pemerintah pusat pada APBD sebesar 91,38%.

Proporsi SD terhadap TPD Perbandingan dengan rata-rata per tahunnya yang sebesar 85,27%. Jadi dapat dikatakan bahwa derajat desentralisasi fiskal (kemandirian daerah) yang dilihat dari prosentase SD terhadap TPD pada era otonomi daerah menguat. Namun, jika dilihat dari rasio pola hubungan dan tingkat kemampuan/kemandirian keuangan daerah yang hanya 14,73% maka akan tergolong dalam pola hubungan *instruktif* yang berarti peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah di Sulawesi Selatan.

Untuk mengetahui kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi otonomi daerah khususnya dibidang keuangan, diukur dari seberapa jauh kemampuan pembiayaan urusan bila didanai sepenuhnya oleh Pendapatan Asli Daerah dan Bagi Hasil dapat disimpulkan dengan uraian sebagai berikut:

Prosentase rata-rata PAD terhadap Pengeluaran Total Daerah sebesar 7,32%. Jika dilihat dari rasio pola hubungan dan tingkat kemampuan/kemandirian suatu daerah maka akan tergolong dalam pola hubungan *instruktif*, tingkat kesiapan

pemerintah daerah di Sulawesi Selatan masih kurang untuk menopang total pengedarannya. Hal ini menunjukkan bahwa pada era otonomi daerah, ketergantungan fiskal pemerintah daerah di Sulawesi Selatan pada pemerintah pusat masih tinggi yaitu sekitar 92,68%.

Perbandingan PAD terhadap Pengeluaran Rutin Daerah dengan rata-rata per tahunnya sebesar 15,31%. Jika dilihat dari rasio pola hubungan dan tingkat kemampuan/kemandirian suatu daerah maka akan tergolong dalam pola hubungan *instruktif* tingkat kesiapan pemerintah daerah di Sulawesi Selatan masih kurang dalam menopang pengeluaran rutin pemerintahannya. Hal ini menunjukkan bahwa pada era otonomi daerah, ketergantungan fiskal pemerintah daerah di Sulawesi Selatan pada pemerintah pusat masih tinggi yaitu sekitar 84,69%.

Perbandingan PAD+BHPBP terhadap Pengeluaran Total Daerah prosentase rata-rata sebesar 16,56% per tahunnya. Jika dilihat dari rasio pola hubungan dan tingkat kemampuan/kemandirian suatu daerah maka akan tergolong dalam pola hubungan *instruktif*, kesiapan pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Selatan masih kurang. Hal ini menunjukkan bahwa pada era otonomi daerah, ketergantungan fiskal pemerintah daerah pada pemerintah pusat masih tinggi yaitu sekitar 83,44%.

Perbandingan PAD+BHPBP terhadap Pengeluaran Rutin Daerah dengan rata-rata 35,39% tiap tahunnya apabila dilihat dengan rasio pola hubungan dan tingkat kemampuan/kemandirian suatu daerah maka akan tergolong dalam pola hubungan *konsultatif* pemerintah daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi. Hal ini ditunjukkan bahwa pada era otonomi daerah, ketergantungan fiskal pemerintah daerah pada pemerintah pusat masih ada yaitu sekitar 64,71%.

Perbandingan PAD per Kapita terhadap Pengeluaran Rutin per Kapita dengan prosentase sebesar 15,32% akan tergolong dalam pola hubungan *instruktif*. Dengan begitu, tingkat kesiapan pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Selatan masih kurang untuk menopang Pengeluaran Rutin Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa pada era otonomi daerah, ketergantungan fiskal pemerintah daerah pada pemerintah pusat masih sekitar 84,68%.

Perbandingan PAD per Kapita terhadap Pengeluaran Total per Kapita dengan prosentase rata-rata sebesar 7,32% akan tergolong dalam pola hubungan *instruktif*, kesiapan pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Selatan masih kurang untuk menopang Pengeluaran Total per Kapita Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa pada era otonomi daerah, ketergantungan fiskal pemerintah daerah pada pemerintah pusat masih sekitar 92,68%.

Perbandingan PAD+BHPBP terhadap Pengeluaran Total Daerah dengan prosentase sebesar 16,56% akan tergolong dalam pola hubungan *instruktif*, kesiapan pemerintah daerah di Sulawesi Selatan masih kurang mampu dalam menopang Pengeluaran Total per Kapita. Hal ini menunjukkan bahwa pada era otonomi daerah, ketergantungan fiskal pemerintah daerah pada pemerintah pusat masih sekitar 83,44%.

Perbandingan PAD+BHPBP per Kapita terhadap Pengeluaran Rutin Daerah per Kapita yang mencapai 35,39% tiap tahunnya apabila dilihat dengan rasio pola hubungan dan tingkat kemampuan/kemandirian suatu daerah maka akan tergolong dalam pola hubungan *konsultatif*. Kesiapan pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Selatan sudah sedikit lebih mampu dalam menopang Pengeluaran Rutin atau pembiayaan pemerintahannya. Kondisi ini menunjukkan bahwa pada era otonomi daerah, ketergantungan fiskal pemerintah daerah pada pemerintah pusat masih ada yaitu sekitar 64,71%.

KESIMPULAN

1. Dari hasil analisis derajat desentralisasi fiskal di atas yang menunjukkan hasil yang masih sangat kurang, maka dapat dikatakan

bahwa kinerja/kemampuan keuangan Pemerintah Daerah di Sulawesi Selatan masih sangat kurang yaitu sekitar 6,78 % sampai 8,62% . Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tingkat ketergantungan fiskal Pemerintah Daerah di Sulawesi Selatan terhadap Pemerintah Pusat pada era otonomi daerah masih tinggi yaitu berkisar antara 85,27% sampai 93,22%.

2. Dari hasil analisis kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi otonomi daerah khususnya dibidang keuangan yang diukur dari seberapa jauh kemampuan Pemerintah Daerah di Sulawesi Selatan dalam membiayai belanja daerah bila didanai sepenuhnya oleh Pendapatan Asli Daerah dan Bagi Hasil, maka apabila dilihat prosentase rata-rata perbandingan PAD terhadap Total Belanja daerah yang sebesar 7,32% dan PAD terhadap Belanja Tidak Langsung daerah yang sebesar 15,71%, dan juga prosentase rata-rata PAD+BHPBP terhadap Total Belanja Daerah yang sebesar 16,56% dan PAD+BHPBP terhadap Belanja Tidak Langsung yang sebesar 35,39% maka dapat dikatakan bahwa Kesiapan Pemerintah Daerah di Sulawesi Selatan dibidang keuangan dalam pembiayaan belanja daerahnya masih sangat kurang. Hal menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan fiskal Pemerintah Daerah di Sulawesi Selatan terhadap Pemerintah Pusat pada era otonomi daerah masih tinggi yaitu berkisar antara 64,61% sampai 92,68%.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Priyo Hari. 2005. *Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi*, Jurnal Kritis. Universitas Kristen Satyawacana Salatiga.
- Bambang Tata S, 2003, *Pola Keuangan Pemerintah Kota (Urban Finance) Kajian Tentang Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal Pada Periode Pelaksanaan Otonomi Tahun Pertama*
- Halim, Abdul (2001) *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah Edisi Revisi*, UPP UMP YKPN, 2002.
- Halim, Abdul, *Akuntansi Sektor Public "Akuntansi Keuangan Daerah"*, Salamba Empat, Jakarta, 2002
- Halim, Abdul, *Akuntansi Sektor Public "Akuntansi Keuangan Daerah"*, Edisi Revisi, Salamba Empat, Jakarta, 2004
- Haryati, Sri, 2006, "*Perbandingan Kinerja Keuangan Daerah" Sebelum Kebijakan Otonomi Daerah Kabupaten Sleman Tahun 1998-2000 dan 2001-2003.*
- Insukirno, dkk, 1994, *Peranan Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Usaha Peningkatan Pendapatan Asli Daerah"*, Laporan Penelitian, FE-UGM, Yogyakarta.
- LPEM-FEUI, 2000. *Laporan Akhir Kebijakan Desentralisasi Dalam Masa Transisi.*
- Mardiasmo (2002), *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Andi, Yogyakarta.
- Mardiasmo (2002) *Otonomi Daerah Sebagai Upaya Memperkokoh Basis Perekonomian Daerah.*
http://www.ekonomirakyat.org/edisi_4/Artikel_3.htm
- Manurung, Romulus. 2008. *Kajian Ekonomi Dan Keuangan. Pusat Kebijakan Ekonomi Dan Keuangan*, Badan Kebijakan Fiskal, Departemen Keuangan R.I.

- Mudrajad Kuncoro. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah, Reformasi Perencanaan, Strategi Dan Peluang*. Jakarta, Penerbit Erlangga.
- Nadeak, Ruslina. 2003. "*Analisis Rasio Keuangan Pada APBD Untuk Menilai Kinerja Pemerintah Daerah*". Skripsi. Jurusan Akuntansi, FE, Universitas Sanata Dharma.
- Richard A. Musgrave & Peggy B. Musgrave, 1980, *Public Finance in theory and Practice*, edisi ke-3, McGraw Hill International Book Company, Tokyo, 1980.
- Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan*, Berbagai Edisi, Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan.
- Sulawesi Selatan Dalam Angka*, berbagai Edisi, Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan.